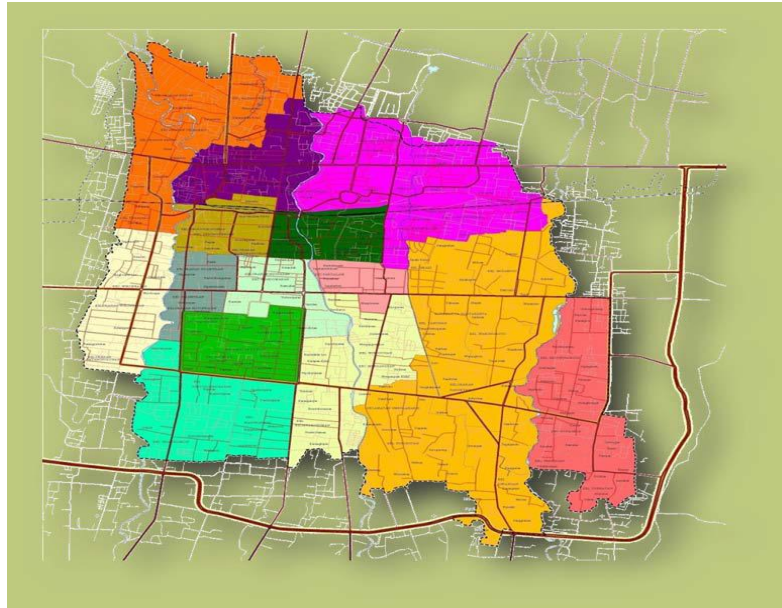


BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

Gambar 2.1 Peta Kota Yogyakarta



A. Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak antara 110o24'19"-110o28'53" Bujur Timur dan antara 07o49'26"-07o15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 - 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa).

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah

Utara ke Selatan yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Cde di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2011 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 351,3 mm dan terendah terjadi pada bulan Juni (1,5 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 114,8 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan april sebesar 85,0 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 70,9 persen. Tekanan udara rata-rata 995,32 mb dan suhu udara rata-rata 25,9 o C.

1. Sejarah Singkat Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Bekas Hutan Bering, suatu kawasan diantara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak srtategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kotamadya Yogyakarta baru dibentuk sejak tanggal 7 Juni 1947 dimana saat berdirinya disebut sebagai Kota Praja. Berbeda dengan kota lainnya, dijaman penjajahan Belanda kota Yogyakarta memang belum pernah menjadi kota otonom. Jadi kota Yogyakarta belum pernah memiliki pemerintahan tersendiri.

Kota Praja Yogyakarta yang lahir dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947 yang membentuk kota Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-undang tersebut merupakan produk perundang-undangan di jaman kemerdekaan tertanggal 7 Juni 1947. Kotamadya Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu, bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan, bahkan lahir pada saat perjuangan nasional, ketika bagsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanatnya yang pertama yang menyatakan, bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 dan atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta beliau bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanatnya yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia. Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat dibentuk satu DPR Kota dan Dewan pemerintahan Kota yang dipimpin oleh Kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, Akan tetapi kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonom yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara Yuridis formal Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 telah sah menjadi Kota Otonom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Persngkst Pemerintahan sudah ada seperti: DPRD, Walikota, wewenangnya telah jelas dan APBD pertamanya juga telah dilampirkan pada Undang-undang pembentukan tersebut. Hanya penyerahan wewenang dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta yang menjadi haknya menurut Undang-undang belum dilaksanakan.

Jika kita melihat keluarnya Undang-undang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947, maka kota Yogyakarta dibentuk sebagai Kota Praja sebelum clash I. Akan tetapi jika kita melihat penyerahan wewenang itu secara riil dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta baru terjadi dalam tahun 1951, maka untuk melaksanakan penyerahan wewenang otonomi tersebut disebabkan terjadinya clash I dan clash II setelah keluarnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947, selain itu juga disebabkan oleh berbagai hal diantaranya; pertama membentuk Kota Yogyakarta sebagai kota otonomi harus melalui Undang-undang, kedua, dengan terbentuknya Kota Yogyakarta, maka akan merupakan bagian yang terpisah dari daerah Kasultanan dan Pakualaman serta memiliki otonomi sendiri.

Nampaknya dalam pembentukan Haminte kota Yogyakarta kurang memperhatikan hal tersebut. Sebab pada tanggal 7 Juni 1947 itu status Daerah Istimewa Yogyakarta belum diatur dengan Undang-undang oleh pemerintah pusat sesuai dengan pasal 18 UUD1945, padahal kota Yogyakarta lebih dahulu dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Haminte Kota dengan Undang-undang.

Ini akan berakibat bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan kehilangan kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah Haminte Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum bersedia menyerahkan sebagian wewenangnya, sebelum status Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan, maka Haminte Kota Yogyakarta tetap menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan tetap mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya Pemerintahan Haminte Kota Yogyakarta.

Masalah itu bisa diatasi setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah di seluruh wilayah dan berdasarkan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan Undang-

undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3 jo.19 tanggal 15 Agustus 1950 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang merubah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947.

Dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Pradja Yogyakarta sama-sama ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1948, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat II sekaligus menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pemerintahan

Tidak seperti kabupaten/kota lain, sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah wilayah administrasi di Yogyakarta tidak mengalami perubahan baik yang diakibatkan pemekaran maupun penggabungan. Jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan. Sementara itu, jumlah kelurahan di kota Yogyakarta sebanyak 45 kelurahan, 615 rukun warga (RW) dan 2529 rukun tetangga (RT). Banyaknya keputusan politik pada tahun 2012 secara total mencapai 135 keputusan atau mengalami kenaikan 48,4 persen.

Tabel 2.1 wilayah administrasi

Wilayah Administrasi	2011	2012	2013
Kecamatan	14	14	14
Kelurahan	45	45	45
Rukun warga	614	614	615
Rukun tetangga	2.524	2.524	2.529

Sumber : Bps Kota Yogyakarta

Keputusan politik terbanyak terkait dengan kebijakan anggaran yaitu mencapai 45 keputusan lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 17 keputusan. Keputusan DPRD juga mengalami kenaikan dari sebanyak 20 keputusan pada tahun 2011 menjadi sebanyak 31 keputusan pada tahun 2012. Untuk keputusan kegiatan panitia musyawarah juga mengalami kenaikan hingga mencapai 24 keputusan pada tahun 2012. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 tercatat 9.641 orang, yang terdiri dari 87,78 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,22 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I sebanyak 3,15 persen, golongan II mencapai 20,41 persen, golongan III sebanyak 44,97 persen dan sisanya golongan IV sebanyak 31,46 persen.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 9963 orang pada tahun 2010 menjadi sebanyak 9916 orang pada tahun 2012. Demikian juga halnya untuk PNS di lingkungan internal pemerintah kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 8463 orang pada tahun 2011 menjadi 8026 orang pada tahun 2012.

Dilihat berdasarkan rasio pegawai Pemkot menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 88,14 persen yang berarti jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Keseimbangan ini terjadi baik pegawai dilingkungan pemerintah kota Yogyakarta maupun di luar pemerintah kota Yogyakarta.

Pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan kualitas tingkat pendidikan para PNS, ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah, sementara jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (diploma ke atas) semakin bertambah. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa sekitar 46,20% PNS di Yogyakarta berpendidikan D4/sarjana, sementara masih ada 5,36 % di antara mereka yang berpendidikan SD dan SMP. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 2012 menghabiskan anggaran sekitar 1023 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD Yogyakarta. Sedangkan dari total penerimaan APBD sebesar 1158 milyar, PAD menyumbang sebesar 339 milyar atau sekitar 27%, dan sebagian besar penerimaan bersumber dari dana DAU mencapai 536 milyar sekitar 42%.

3. Penduduk

Berdasarkan hasil pengolahan akhir Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk kota Yogyakarta adalah 388.627 orang yang terdiri dari 189.137 laki-laki dan 199.490 perempuan. Dari jumlah tersebut, secara kewilayahan terkonsentrasi di dua kecamatan besar yaitu Umbulharjo sebanyak 76.743 orang dan kecamatan Gondokusuman sebanyak 45.293 orang. Sedangkan Kecamatan Ngampilan, Gondomanan, dan Pakualaman merupakan tiga kecamatan urutan terbawah yang memiliki penduduk paling sedikit masing-masing berjumlah 16.320 orang, 13.029 orang, dan 9.316 orang.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari

100. Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di kota Yogya mencapai angka 94,81. Diantara 14 kecamatan di kota Yogyakarta terdapat satu kecamatan yaitu Wirobarajan memiliki sex ratio sebesar 102,48. Dengan luas wilayah 32,5 Km², rata-rata kepadatan penduduk kota Yogyakarta adalah sebesar 11.957 jiwa perkilometer persegi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Ngampilan yaitu sebanyak 19.902 jiwa/km², sedangkan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu Umbulharjo mencapai 9.451 jiwa/km².

Dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sebesar 396.711 jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2010 justru mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,22 persen pertahun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Jika dilihat per kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kecamatan Kotagede yakni sebesar 1,10 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan paling rendah terjadi di kecamatan Pakualaman yaitu sebesar -1,28 persen pertahun. Kecamatan Umbulharjo yang mempunyai jumlah penduduk terbesar berjalan linier dengan laju pertumbuhannya yaitu 1,02 persen per tahun.

Sex ratio penduduk kota Yogyakarta hasil Sensus Penduduk 2012 sebesar 94,51 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lima persen lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di
Yogyakarta, tahun 2012**

Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mantirejan	15.389	16.306	31.695
Kraton	8.370	9.191	17.561
Margangsan	14.445	15.003	29.448
Umbulharjo	37.922	40.909	78.831
Kotagede	15.948	16.104	32.052
Gondokusuman	22.022	23.054	45.526
Danurejan	9.061	9.372	18.433
Pakualaman	4.541	4.825	9.366
Gondomanan	6.123	6.974	13.097
Ngampilan	7.633	8.769	16.402
Wirobrajan	12.635	12.334	24.969
Gedongtengen	8.215	9.058	17.273
Jetis	11.504	12.066	17.273
Tegalrejo	17.637	18.152	35.789
Yogyakarta	191.445	202.567	394.012

Sumber : BPS Kota Yogyakarta,

Sex ratio terbesar adalah kecamatan Wirobrajan yakni sebesar 102,48 yang berarti jumlah penduduk laki-laki dua persen lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sedangkan sex ratio paling kecil berada di kecamatan Ngampilan yakni sebesar 87,16.

B. Biografi Bung Karno

Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo . Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo seorang guru di Surabaya, Jawa . Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Cokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke HBS. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Serikat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi, Jong Java (Pemuda Jawa).

Tamat HBS di tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hogeschool (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung Soekarno berinteraksi dengan Cipto Mangunkusumo dan [Douwes Dekker](#), yang saat itu merupakan pemimpin National Indische Partij.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pidato pembelaannya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno

kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun, semangatnya tetap membara. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak begitu memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memanfaatkan tokoh Indonesia, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Organisasi seperti Jawa Hokokai Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI, dan PPKI, selalu melibatkan tokoh Indonesia yang memilih strategi kooperatif.

Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, di antaranya merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan, Kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Pada bulan Agustus 1945, Ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun, Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang.

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional kemudian mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 17 Agustus 1945, berkumandanglah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno dan ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Kedatangan kembali pasukan Belanda bersama pasukan sekutu memicu perang antara Belanda dan sekutu melawan rakyat Indonesia. Akibatnya, ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan

Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno

Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak Ia “bercerai” dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan PKI melalui G 30 S. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur. Makam beliau hingga kini ramai dikunjungi, terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno.

- Tempat/Tgl. Lahir: Surabaya, 6 Juni 1901
- Tempat/Tgl Wafat: Jakarta, 21 Juni 1970
- SK Presiden: No. 081/TK/Tahun 1986, Tgl. 23 Oktober 1985
- Gelar: Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional

1. Pendidikan

- Pendidikan sekolah dasar di Eerste Inlandse School, Mojokerto
- Pendidikan sekolah dasar di Europeesche Lagere School (ELS), Mojokerto (1911)
- Hoogere Burger School (HBS) Mojokerto (1911-1915)
- Technische Hoge School, Bandung (sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung) (1920)

2. Penghargaan

- Gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri antara lain dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Columbia University (Amerika Serikat), Berlin University (Jerman), Lomonosov University (Rusia) dan Al-Azhar University (Mesir).
- Penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, atas jasa Soekarno dalam mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari politik apartheid. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria (April 2005).¹

C. Gambaran Umum Partai Gerindra

1. Profil Partai

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.

Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat.

¹ <http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soekarno/>, diakses pada 29 Agustus 2015, pukul 20.00wib.

Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa Tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,” kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, **Edmund Burke: “*The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.*”** Dalam terjemahan bebasnya, **“kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.”** terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang

berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.²

2. Visi Partai GERINDRA

Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra#sthash.9b0qeC9U.dpuf> Diakses pada 20 Mei 2015 pukul 20.00Wib

3. Misi Partai GERINDRA

Partai GERINDRA memiliki 5 (lima) misi, yaitu :

- a. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing;
- c. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum;
- e. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat.³

4. Tujuan Partai GERINDRA

Tujuan Didirikannya Partai GERINDRA :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945;
- b. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia,

³ <http://partaigerindra.or.id/> Diakses pada tanggal 20 mei 2015 pukul 20.00 Wib.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan;
- e. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa

5. Fungsi Partai GERINDRA

Ada beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh Partai GERINDRA, yaitu :

- a. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa;
- b. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- c. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila;
- e. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara;
- f. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- g. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- h. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Tugas Partai GERINDRA

Tugas pokok yang menjadi kewajiban setiap pengurus, kader, dan anggota Partai GERINDRA untuk ditunaikan adalah :

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional
- c. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai;
- e. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan; dan
- f. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai tertua yang menjadi peserta Pemilu 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, di mana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih.

2. Visi Dan Misi

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

Pertama, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai, dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai. Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI-Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

3. Platform Pdi

- a. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
- b. Memperkokoh budaya gotong royong dalam memecahkan masalah bersama
- c. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan system produksi, reform agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.

- d. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
- e. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat
- f. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah
- g. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten
- h. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- i. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
- j. Menegakkan hokum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hal azasi manusia.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PDIP meliputi :30

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP yang meliputi wilayah NKRI
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD yang meliputi wilayah Provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC yang meliputi wilayah Kabupaten/ Kota;
- d. Pengurus Anak Cabang disingkat PAC yang meliputi wilayah Kecamatan;
- e. Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah Desa/Kelurahan dan atau yang setingkat;

- f. Pengurus Anak Ranting Partai yang meliputi wilayah dusun/dukuh/
Rukun Warga/Lorong/Gang dan atau sebutan lainnya ⁴

⁴ <http://www.pdiperjuangan.or.id/> Diakses pada 22 mei 2015 pukul 09.00 Wib.